



RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2023



“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan sebagai format dokumen resmi Rencana Kerja Tahunan Instansi Pemerintah yang berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 ini, diperlukan data dan informasi berkenaan dengan capaian kinerja yang dihitung 3 tahun terakhir. Mengingat aplikasi penganggaran saat ini sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja, sehingga perlu koordinasi yang kuat antar Bidang guna mengevaluasi capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2022 juga mengevaluasi sejauh mana keberhasilan program kegiatan yang dilakukan pada tahun yang lalu serta menganalisis kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 ini, diharapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dan sasaran yang dirumuskan dapat tercapai.

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,

Kepala,



H. Akhmad Mukhlis, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196406211993031004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii-iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3-4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5-6
1.4 Sistematika Penulisan.....	5-6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra BPKAD	7-8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	27-29

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29-30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	45

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	60
---	----

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	63-64
--	-------

BAB V PENUTUP	77
---------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.....	2
-----------------	--	---

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2021.....	9-21
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	23-26
Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	31-44
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Provinsi Sumatera Selatan....	46-57
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	61-62
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	65-76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk terwujudnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terarah, sistematis dan pencapaian kinerja yang optimal maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan merumuskan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tiap tahunnya. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut disusun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pada prinsipnya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra), dimana di dalamnya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki kesesuaian, tidak menyimpang dan dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 yang telah ditetapkan sehingga tujuan, sasaran dan target pembangunan dapat direalisasikan secara optimal.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonom Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- l. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- r. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 6/2021 Tanggal 22 September 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 tanggal 22 Mei 2019;
- u. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 ;
- v. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 tanggal 8 Juli 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah menyediakan tolok ukur pelaksanaan pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2023 yang membuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah:

1. Menjabarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2024 ke dalam rencana pembangunan tahunan.
2. Menyediakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran program dan kegiatan tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

Berisikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2022 dan capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, reviu terhadap rancangan awal RKPD.

Bab. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan rencana kerja dan pendanaan, program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bab. V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dan Capaian Renstra BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan pemerintahan pada urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didalamnya terdapat bidang Sekretariat, Perencanaan Anggaran Daerah, Perbendaharaan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2024. Setiap program selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan yang mendukung. Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menunaikan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, setiap program dan kegiatan dibebani suatu indikator kinerja. Program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (*output*). Target capaian kinerja ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam Rencana Kerja (Renja).

Hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Tabel T-C.29 berikut menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

Tabel TC. 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN PENCAPAIAN RENSTRA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
S/D TAHUN 2022

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR) RENSTRA OPD TAHUN 2022	REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)		TINGK AT REALI SASI (%)	TARGET REALISASI PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022 (n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2022 (n-2)	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2022 (n-2)			REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi								
5.02.01.1.01	1 Perencanaan Pangangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Pangangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100%			100%
5.02.01.1.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, Revisi Renstra yang disusun	2 Buku	2 Buku		2 Buku		2 Buku	2 Buku	
5.02.01.1.01.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	

RENCANA KERJA BPKAD 2023

5.02.01.1.01.03	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
5.02.01.1.01.04	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		
5.02.01.1.01.05	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		
5.02.01.1.01.06	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laktip yang disusun	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku		
5.02.01.1.01.07	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kinerja perangkat daerah yang dievaluasi	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan		
5.02.01.1.02	H	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.1.02.01	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	110 ASN	110 ASN	110 ASN	110 ASN	110 ASN	110 ASN	110 ASN	110 ASN	110 ASN	110 ASN	110 ASN		
5.02.01.1.02.02	9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		
5.02.01.1.02.03	10	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi		
5.02.01.1.02.04	11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen		

5.02.01.1.02.05	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terkoordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen								
5.02.01.1.02.06	13	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemertiksaan	Jumlah Laporan Hasil Tanggapan Pemertiksaan dan Vertifikasi Hibah	3 Laporan & 17 Kab/ Kota	3 Laporan & 17 Kab/ Kota	3 Laporan & 17 Kab/ kota	3 Laporan & 17 Kab/ Kota	3 Laporan & 17 Kab/ kota	3 Laporan & 17 Kab/ Kota	3 Laporan & 17 Kab/ Kota	3 Laporan & 17 Kab/ Kota								
5.02.01.1.02.07	14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan								
5.02.01.1.02.08	15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan								
5.02.01.1.03	HI	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									100%							100%
5.02.01.1.03.01	16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan								
5.02.01.1.03.02	17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan dan deposit box yang dijamin	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2								
5.02.01.1.03.04	18	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan dan hasil penerimaan daerah dari TP-TGR	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan								

5.02.01.1.03.05	19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Laporan BMD pada SKPD yang disusun	1 Laporan																		
5.02.01.1.03.06	20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	21 unit kendaraan dinas	21 unit kendaraan dinas	21 unit kendaraan dinas	21 unit kendaraan dinas	21 unit kendaraan dinas	21 unit kendaraan dinas	21 unit kendaraan dinas	21 unit kendaraan dinas	21 unit kendaraan dinas	21 unit kendaraan dinas	21 unit kendaraan dinas	21 unit kendaraan dinas	21 unit kendaraan dinas	21 unit kendaraan dinas	21 unit kendaraan dinas	21 unit kendaraan dinas	21 unit kendaraan dinas	21 unit kendaraan dinas	
5.02.01.1.05	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
5.02.01.1.05.02	21	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakain Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	600 org/stel	600 org/stel	600 org/stel	600 org/stel	600 org/stel	600 org/stel	600 org/stel	600 org/stel	600 org/stel	600 org/stel	600 org/stel	600 org/stel	600 org/stel	600 org/stel	600 org/stel	600 org/stel	600 org/stel	600 org/stel	
5.02.01.1.05.03	22	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang dihimpun analisa jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
5.02.01.1.05.05	23	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan analisa jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
5.02.01.1.05.09	24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang dikirim mengikuti Diklat	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	
5.02.01.1.06	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
5.02.01.1.06.01	25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41 jenis	41 jenis	41 jenis	41 jenis	41 jenis	41 jenis	41 jenis	41 jenis	41 jenis	41 jenis	41 jenis	41 jenis	41 jenis	41 jenis	41 jenis	41 jenis	41 jenis	41 jenis	
5.02.01.1.06.02	26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas

5.02.01.1.06.03	27	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	14 jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	14 jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	14 jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	14 jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	14 jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	14 jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	14 jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	14 jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	14 jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	
5.02.01.1.06.04	28	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan Penyediaan Makanan Minum	10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih	10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih	10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih	10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih	10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih	10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih	10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih	10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih	10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih	
5.02.01.1.06.05	29	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan Barang cetakan dan Penggandaan	40 jenis yang dicetak, 45,000 counter	40 jenis yang dicetak, 45,000 counter	40 jenis yang dicetak, 45,000 counter	40 jenis yang dicetak, 45,000 counter	40 jenis yang dicetak, 45,000 counter	40 jenis yang dicetak, 45,000 counter	40 jenis yang dicetak, 45,000 counter	40 jenis yang dicetak, 45,000 counter	40 jenis yang dicetak, 45,000 counter	
5.02.01.1.06.06	30	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7 surat kabar	7 surat kabar	7 surat kabar	7 surat kabar	7 surat kabar	7 surat kabar	7 surat kabar	7 surat kabar	7 surat kabar	
5.02.01.1.06.07	31	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	50 Jenis ATK	50 Jenis ATK	50 Jenis ATK	50 Jenis ATK	50 Jenis ATK	50 Jenis ATK	50 Jenis ATK	50 Jenis ATK	50 Jenis ATK	
5.02.01.1.06.08	32	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu di ruangan konsultasi	10,000 tamu	10,000 tamu	10,000 tamu	10,000 tamu	10,000 tamu	10,000 tamu	10,000 tamu	10,000 tamu	10,000 tamu	
5.02.01.1.06.09	33	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan Laporan Koordinasi dan Konsultasi	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	
5.02.01.1.06.10	34	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Keterbukaan Informasi Publik	Sosialisasi PPIID di Lingkungan BPKAD Provinsi Sumsel	Sosialisasi PPIID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	Sosialisasi PPIID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	Sosialisasi PPIID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	Sosialisasi PPIID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	Sosialisasi PPIID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	Sosialisasi PPIID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	Sosialisasi PPIID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	Sosialisasi PPIID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	
5.02.01.1.06.11	35	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpelihara	7 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi	

5.02.01.1.09.02	40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenahi	4 R4, 4 R2	4 R4, 4 R2	4 R4, 4 R2	4 R4, 4 R2	4 R4, 4 R2	4 R4, 4 R2	4 R4, 4 R2	4 R4, 4 R2	4 R4, 4 R2		
5.02.01.1.09.06	41	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	4 jenis perlatan dan mesin lainnya	4 jenis perlatan dan mesin lainnya	4 jenis perlatan dan mesin lainnya	4 jenis perlatan dan mesin lainnya	4 jenis perlatan dan mesin lainnya	4 jenis perlatan dan mesin lainnya	4 jenis perlatan dan mesin lainnya	4 jenis perlatan dan mesin lainnya	4 jenis perlatan dan mesin lainnya		
5.02.01.1.09.07	42	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlatan dan mesin venue dan lahan/area di JSC yang terpelihara	Venue, lahan/area JSC	Venue, lahan/area JSC	Venue, lahan/area JSC	Venue, lahan/area JSC	Venue, lahan/area JSC	Venue, lahan/area JSC	Venue, lahan/area JSC	Venue, lahan/area JSC	Venue, lahan/area JSC		
5.02.01.1.09.09	43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dirhab	2 unit gedung kantor, 1 gudang arsip	2 unit gedung kantor, 1 gudang arsip	2 unit gedung kantor, 1 gudang arsip	2 unit gedung kantor, 1 gudang arsip	2 unit gedung kantor, 1 gudang arsip	2 unit gedung kantor, 1 gudang arsip	2 unit gedung kantor, 1 gudang arsip	2 unit gedung kantor, 1 gudang arsip	2 unit gedung kantor, 1 gudang arsip		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		APBD yang Tepat Waktu											
5.02.02.1.01	I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										100%	100%
5.02.02.1.01.01	44	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		
5.02.02.1.01.02	45	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		

5.02.02.1.01.07	46	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran APBD	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku RKA, 500 DPA	100%
5.02.02.1.01.08	47	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperda dan Rapergub Perubahan APBD	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku RKA, 500 DPA	100%
5.02.02.1.01.10	48	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Perda yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.02.02.1.02	49	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota	Persentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang terlaksana	17 SK	17 SK	17 SK	17 SK	17 SK	17 SK	17 SK	17 SK	17 SK	100%

5.02.02.1.02.03	50	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang terlaksana	17 SK	17 SK	17 SK	17 SK	17 SK	17 SK	17 SK	17 SK		
5.02.02.1.02.04	51	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/ Kota	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban APBD	17 SK	17 SK	17 SK	17 SK	17 SK	17 SK	17 SK	17 SK		
5.02.02.1.03.01	52	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%
5.02.02.1.03.04	53	Penatausahaan Pembayaan Daerah	Jumlah kewajiban biaya pengeluaran dan biaya provisi	SMI	SMI	SMI	SMI	SMI	SMI	SMI	SMI		

5.02.02.1.03.05	54	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,	Jumlah Laporan Rekonsiliasi DAK Fisik dan Non Fisik	3 laporan/ jenis Dana Transfer	3 laporan/ jenis Dana Transfer	3 laporan/ jenis Dana Transfer	3 laporan/ jenis Dana Transfer	3 laporan/ jenis Dana Transfer	3 laporan/ jenis Dana Transfer	3 laporan/ jenis Dana Transfer	3 laporan/ jenis Dana Transfer		
5.02.02.1.03.06	55	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
5.02.02.1.03.09	56	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD		
5.02.02.1.04	iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										
5.02.02.1.04.02	57	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Laporan rekonsiliasi	12 buku dan 5 SK Kab/Kota	12 buku dan 5 SK Kab/Kota	12 buku dan 5 SK Kab/Kota	12 buku dan 5 SK Kab/Kota	12 buku dan 5 SK Kab/Kota	12 buku dan 5 SK Kab/Kota	12 buku dan 5 SK Kab/Kota	12 buku dan 5 SK Kab/Kota		
												100%	100%

5.02.02.1.04.04	58	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi		100%	100%
5.02.02.1.04.05	59	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		100%	100%
5.02.02.1.05	V	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah									100%	100%
5.02.02.1.05.01	60	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Kewajiban cicilan bunga pinjaman	SMI	SMI	SMI	SMI	SMI	SMI	SMI			
5.02.02.1.05.02	61	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota			
5.02.02.1.05.03	62	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang dikelola	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota			

5.02.02.1.05.04	63	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Dana bagi Hasil Provinsi yang dikelola	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota	17 Kab/ Kota			
5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Pengelolaan Barang MILIK Daerah									
5.02.03.1.01	1	Pengelolaan Barang MILIK Daerah	Persentase Pengelolaan Barang MILIK Daerah							100%	100%	
5.02.03.1.01.01	64	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
5.02.03.1.01.03	65	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang MILIK Daerah	Jumlah laporan RKBMD yang disusun	41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan			
5.02.03.1.01.05	66	Penatausahaan Barang MILIK Daerah	Jumlah Berita Acara Serah Terima Barang MILIK Daerah	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset		
5.02.03.1.01.07	67	Pengamanan Barang MILIK Daerah	Jumlah BMD yang diamankan	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD			
5.02.03.1.01.08	68	Penilaian Barang MILIK Daerah	Jumlah Laporan Penilaian Barang MILIK Daerah	20 Laporan Penilaian BMD	20 Laporan Penilaian BMD	20 Laporan Penilaian BMD	20 Laporan Penilaian BMD	20 Laporan Penilaian BMD	20 Laporan Penilaian BMD			
5.02.03.1.01.09	69	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang MILIK Daerah	Persentase aset yang terinventarisasi	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD			

5.02.03.1.01.10	70	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Peminดาhtang anan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah SK MOU (kerjasama), Perjanjian kerjasama	10 SK/MOU/ PKS (kerjasama)	10 SK/ MOU/ PKS (kerjasama)	10 SK/ MOU PKS (kerjasama)	10 SK/ MOU/PKS (kerjasama)	10 SK / MOU /PKS (kerjasama)	10 SK /MOU /PKS (kerjasama)	10 SK /MOU /PKS (kerjasama)	
5.02.03.1.01.11	71	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD tahunan dan semester	1 Laporan Rekon Pertiwulana n, 40 BA Rekon BMD dg OPD	1 Laporan Rekon Pertiwulanan, 40 BA Rekon BMD dg OPD	1 Laporan Rekon Pertiwulanan, 40 BA Rekon BMD dg OPD	1 Laporan Rekon Pertiwulana n, 40 BA Rekon BMD dg OPD	1 Laporan Rekon Pertiwulana n, 40 BA Rekon BMD dg OPD	1 Laporan Rekon Pertiwulana n, 40 BA Rekon BMD dg OPD	1 Laporan Rekon Pertiwulana n, 40 BA Rekon BMD dg OPD	
5.02.03.1.01.12	72	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 laporan 362 Berita Acara Rekon dengan SMA/SMK/ SLB	1 laporan 362 Berita Acara Rekon dengan SMA/SMK/ SLB	1 laporan 362 Berita Acara Rekon dengan SMA/SMK/ SLB	1 laporan 362 Berita Acara Rekon dengan SMA/SMK/ SLB	1 laporan 362 Berita Acara Rekon dengan SMA/SMK/ SLB	1 laporan 362 Berita Acara Rekon dengan SMA/SMK/ SLB	1 laporan 362 Berita Acara Rekon dengan SMA/SMK/ SLB	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dicapai dengan melaksanakan seluruh program yang diamanatkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam amanat tersebut adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang urusan yang dilimpahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Indikator kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terletak pada sasaran pembangunan dalam Renstra. Indikator kinerja pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) dan menggambarkan indikator kinerja program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada Tabel T-C.30, termasuk dalam analisis tersebut adalah proyeksi kinerja pelayanan tahun rencana dan satu tahun maju.

TABEL T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (th. n-2)	Tahun 2022 (th. n-1)	Tahun 2023 (th. n1)	Tahun 2024 (th. n+1)	Tahun 2021 (th. n-2)	Tahun 2022 (th. n-1)	Tahun 2023 (th. n1)	Tahun 2024 (th. n+1)		
1	-Penetapan perda dan pergub APBD yang tepat waktu	(3)	(4)	(5) Tepat Waktu	(6) Tepat Waktu	(7) Tepat Waktu	(8) Tepat Waktu	(9) Tepat Waktu	(10) Tepat Waktu	(11) Tepat Waktu	(12) Tepat Waktu	(13)	LK-SKPD TA 2022 baru akan disampaikan ke BPKAD Prov. Sumsel pada bidang akuntansi dan pelaporan tanggal 1 Februari 2023, kemudian disampaikan ke BPK tanggal 30 Maret 2023
2	-Budget Execution Persentase dokumen SPJ yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

3	<p>Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen</p>		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	<p>LK-SKPD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan SKPD yang dikirim ke BPKAD Prov. Sumssel melalui bidang akuntansi dan pelaporan</p>
4	<p>-Asset Management</p>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Untuk mengetahui kondisi aset, maka setelah data aset diinput dalam SIMDA BMD, kemudian akan dilakukan cek fisik terhadap aset tersebut.</p>
5	<p>-Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku</p>		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	<p>Persentase tertibnya dokumen perencanaan, pelaporan, data informasi, administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset yang tepat waktu</p>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

6	Persentase APBD/APBDP Kab/Kota yang tepat waktu dan benar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Laporan Pertanggung jawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dalam upaya untuk mencapai target diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menentukan strategi dan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan selama periode rentang waktu 2021-2024. Berdasarkan hasil yang telah dicapai selama rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Pada tahun 2021, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang ke-8 (delapan) kali. Opini ini menunjukkan bahwa BPKAD Provinsi Sumatera Selatan bersama OPD terkait selalu berusaha untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK yang menjadi penghambat untuk mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tersebut.

Untuk mengatasi kendala perhitungan aset daerah, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengaplikasikan Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) BMD versi terbaru (2.0.7.11.R7.1) bersama OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar bisa menghitung penyusutan aset untuk menunjang kebijakan Akrual Basis.
2. Melakukan perbaikan kepemilikan dan perpanjangan sertifikat untuk yang masanya sudah habis.
3. Menginventarisasikan aset-aset daerah yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Mencocokkan data yang ada di OPD dengan SIMDA BMD (verifikasi aset).

Untuk menunjang Aplikasi SIPD Keuangan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Bimbingan Teknik (BimTek) SIPD.
2. Menerapkan data terupdate Aplikasi SIPD dari Kementerian Dalam Negeri.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dihadapkan pada beberapa permasalahan, terutama permasalahan terkait pelayanan dalam mencapai target kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.30, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya aset yang tidak terpakai tidak dilaporkan oleh OPD.
2. Pemakaian rumah dinas belum tertib peruntukannya.
3. Masih kurangnya kepedulian OPD dalam pengelolaan aset daerah.
4. Masih banyak tanah yang belum besertifikat, lokasi aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagian tersebar diwilayah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dan masih terdapat aset tanah yang status kepemilikannya tumpang tindih dengan pihak lain.
5. Masih ada beberapa OPD yang melakukan rehab gedung dan bangunan tetapi belum melakukan penghapusan aset, sehingga nilai penyusutan aset tidak bisa dicatat.
6. Aplikasi koordinator pendapatan tidak ada interkoneksi dengan aplikasi keuangan, belum ada produk hukum yang mengatur masalah retribusi, hal ini menyebabkan penatausahaan pendapatan di koordinator pendapatan (Bapenda) belum valid.
7. Masih rendahnya realisasi pencapaian setoran TP/TGR.

Permasalahan-permasalahan diatas akan segera ditindak lanjuti pada program dan kegiatan yang ada di Tahun Anggaran 2023 agar visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan serta capaian program nasional di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dapat terwujud. Hal ini terkait dengan capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD yang pelaksanaannya adalah oleh OPD-OPD sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan.

Tantangan (*treaths*) yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengembangan pelayanan tahun 2023, antara lain sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan Aplikasi Pemerintah yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri yaitu penyusunan anggaran tahun 2022, selain itu SIPD juga disandingkan dengan Aplikasi FMIS (Financial Management Information System) untuk proses penatausahaan dan pertanggungjawaban.
2. Penerapan anggaran berbasis kinerja untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran.
3. Mendata seluruh aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Melakukan inventarisasi seluruh aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Optimalisasi pemanfaatan aset, sehingga bisa menambah PAD Provinsi Sumatera Selatan.

Peluang-peluang (*opportunities*) pengembangan pelayanan tahun 2023 di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Perkembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
3. Terdapat sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD provinsi (pihak swasta) yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah kearah yang lebih baik sesuai visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2024.
4. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang peluang investasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
5. Adanya peluang investasi dari pihak asing di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai uraian singkat tersebut di atas, isu penting yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 adalah :

1. Bagaimana mensosialisasikan segera peraturan baru dibidang keuangan dan aset daerah.
2. Bagaimana mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.
3. Bagaimana meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota secara periodik.
4. Bagaimana meningkatkan kualitas SDM.
5. Bagaimana meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset, sehingga bisa meningkatkan PAD.
6. Bagaimana mengembangkan SIMDA Barang Milik Daerah agar dapat mengoptimalkan inventarisasi barang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

Penyusunan rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan arahan Gubernur Sumatera Selatan terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel T-C.31 berikut memberikan gambaran identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya.

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	PLG	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	98.000.000		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	PLG	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	98.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PLG	Jumlah Dokumen Lapid yang disusun	1 buku	136.000.000		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PLG	Jumlah Dokumen Lapid yang disusun	1 buku	136.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PLG	Jumlah kinerja perangkat daerah yang dievaluasi	8 laporan	505.000.000		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PLG	Jumlah kinerja perangkat daerah yang dievaluasi	8 laporan	505.000.000	
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		106.043.539.000		ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		106.043.539.000	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PLG	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	110 ASN	101.562.669.000		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PLG	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	110 ASN	101.562.669.000	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PLG	Jumlah Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	5 ASN dan 85 Non ASN	2.885.110.000		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PLG	Jumlah Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	5 ASN dan 85 Non ASN	2.885.110.000	
10	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PLG	Jumlah jasa administrasi keuangan	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikator	787.360.000		10	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PLG	Jumlah jasa administrasi keuangan	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikator	787.360.000	
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	PLG	Jumlah Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang terkoordinasi	10 Dokumen	65.000.000		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	PLG	Jumlah Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang terkoordinasi	10 Dokumen	65.000.000	

12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PLG	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terkoordinasi	1 Dokumen	150.000.000	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PLG	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terkoordinasi	1 Dokumen	150.000.000
13	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	PLG KAB/KOTA	Jumlah Laporan Hasil Tanggapan Pemeriksaan dan verifikasi hibah	10 Laporan dan 17 Kab/Kota	403.400.000	13	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	PLG & Kabkota	Jumlah Laporan Hasil Tanggapan Pemeriksaan dan verifikasi hibah	3 Laporan dan 17 Kab/Kota	403.400.000
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PLG	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	140.000.000	14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PLG	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	140.000.000
15	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PLG	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	50.000000	15	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PLG	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	50.000000
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PLG	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Laporan	55.000.000	16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PLG	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Laporan	55.000.000
17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PLG	Jumlah kendaraan dan deposit box yang dijamin	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	215.000.000	17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PLG	Jumlah kendaraan dan deposit box yang dijamin	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	215.000.000
11	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		645.000.000	11	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi i Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		645.000.000

18	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PLG	Jumlah laporan dan hasil penerimaan daerah dari TP-TGR	1 Laporan	250.000.000		18	Pembinaan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PLG	Jumlah laporan dan hasil penerimaan daerah dari TP-TGR	1 Laporan	250.000.000	
19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PLG	Jumlah Rekonsiliasi dan Laporan BMD pada SKPD yang disusun	1 Laporan	55.000.000		19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PLG	Jumlah Rekonsiliasi dan Laporan BMD pada SKPD yang disusun	1 Laporan	55.000.000	
20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PLG	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	21 Unit Kendaraan Dinas	70.000.000		20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PLG	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	21 Unit Kendaraan Dinas	70.000.000	
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		693.250.000		iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		693.250.000	
21	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PLG	Jumlah ASN yang dihimpun analisa jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan	1 Laporan	413.250.000		21	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PLG	Jumlah ASN yang dihimpun analisa jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan	1 Laporan	413.250.000	
22	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PLG	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (PK)	110 ASN	80.000.000		22	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PLG	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (PK)	110 ASN	80.000.000	
23	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PLG dan LUAR PROV.	Jumlah Pegawai yang dikirim mengikuti diklat	15 orang	200.000.000		23	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PLG & LUAR PROV	Jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat	15 orang	200.000.000	

30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PLG	Jumlah kebutuhan Laporan Koordinasi dan Konsultasi	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	1.000.000.000		30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PLG	Jumlah kebutuhan Laporan Koordinasi dan Konsultasi	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	1.000.000.000	
31	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PLG	Jumlah Keterbukaan Informasi Publik	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	466.400.000		31	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PLG	Jumlah Keterbukaan Informasi Publik	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	466.400.000	
32	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PLG	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpelihara	7 Aplikasi	248.000.000		32	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PLG	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpelihara	7 Aplikasi	248.000.000	
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.370.000.000			vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.370.000.000		
33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PLG	Jumlah surat menyurat yang dikirim	6000 surat	40.000.000		33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PLG	Jumlah surat menyurat yang dikirim	6000 surat	40.000.000	
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PLG	Jumlah tagihan komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	6 rekening listrik, 6 rekening telepon 6 rekening Air, 9 rekening internet	1.330.000.000		34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PLG	Jumlah tagihan komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	6 rekening listrik, 6 rekening telepon 6 rekening Air, 9 rekening internet	1.330.000.000	
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	7.234.570.000			vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	7.234.570.000		

35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PLG	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi	17 R4, 10 R2	990.000.000		35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PLG	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi	17 R4, 10 R2	990.000.000	
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PLG	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	4 R4, 4 R2	349.250.000		36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PLG	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	4 R4, 4 R2	349.250.000	
37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PLG	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	4 jenis peralatan dan mesin lainnya	955.000.000		37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PLG	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	4 jenis peralatan dan mesin lainnya	955.000.000	
38	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PLG	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	2 unit gedung kantor, 1 gudang arsip	4.940.000.000		38	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PLG	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	2 unit gedung kantor, 1 gudang arsip	4.940.000.000	

II PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		APBD yang Tepat Waktu		3.832.719.151.820 II		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		APBD yang Tepat Waktu		3.832.719.151.820	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	PLG	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.795.000.000		1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	PLG	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.795.000.000	
39	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Daerah	PLG	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS	2 dokumen	360.000.000	39	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	PLG	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS	2 dokumen	360.000.000
40	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	PLG	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	360.000.000	40	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	PLG	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	360.000.000
41	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	PLG	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran APBD	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	1.200.000.000	41	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	PLG	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran APBD	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	1.200.000.000
42	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	PLG	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran Perubahan APBD	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	1.150.000.000	42	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	PLG	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran Perubahan APBD	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	1.150.000.000
43	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	PLG	Jumlah Perda yang dihasilkan	1 Dokumen	725.500.000	43	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	PLG	Jumlah Perda yang dihasilkan	1 dokumen	725.500.000

46	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban APBD	17 SK	300.000.000	46	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban APBD	17 SK	300.000.000	
45	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.762.937.700	46	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.762.937.700			
47	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	PLG	Jumlah laporan rekonsiliasi pengelolaan kas daerah	12 Laporan	564.250.000	47	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	PLG	Jumlah laporan rekonsiliasi pengelolaan kas daerah	12 Laporan	564.250.000	
48	Penatausahaan Pembayaan Daerah	PLG	Jumlah kewajiban biaya pengelolaan dan biaya provisi	SMI	4.326.187.700	48	Penatausahaan Pembayaan Daerah	PLG	Jumlah kewajiban biaya pengelolaan dan biaya provisi	SMI	4.326.187.700	
49	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	PLG	Jumlah Laporan Rekonsiliasi DAK Fisik dan Non Fisik	3 Laporan Jenis Dana Transfer	155.000.000	49	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	PLG	Jumlah Laporan Rekonsiliasi DAK Fisik dan Non Fisik	3 Laporan/ Jenis Dana Transfer	155.000.000	

50	Koordinasi, Pelaksanaan dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	PLG	Jumlah laporan pelaksanaan transaksi non tunai	1 Laporan	205.500.000								
51	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Terkait	PLG	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D	41 OPD	512.000.000								
iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1.293.680.000								
52	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	PLG	Jumlah Laporan rekonsiliasi	12 Buku, 5 SK Kab/Kota	310.550.000								
53	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	PLG	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	503.600.000								
50	Koordinasi, Pelaksanaan dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	PLG	Jumlah laporan pelaksanaan transaksi non tunai	1 Laporan	205.500.000								
51	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Terkait	PLG	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D	41 OPD	512.000.000								
iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1.293.680.000								
52	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	PLG	Jumlah Laporan rekonsiliasi	12 Buku, 5 SK Kab/Kota	310.550.000								
54	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	PLG	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	503.600.000								

59	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	PLG	Jumlah Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggung jawaban	479.530.000	59	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	PLG	Jumlah Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggung jawaban	479.530.000
v	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		3.820.527.034.120	v	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		3.820.527.034.120
60	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	PLG	Jumlah Kewajiban cicilan bunga pinjaman	SMI	16.000.000.000	60	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	PLG	Jumlah Kewajiban cicilan bunga pinjaman	SMI	16.000.000.000
61	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab/ Kota	Jumlah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 Kab/ Kota	1.844.936.267.453	61	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab/ Kota	Jumlah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 Kab/ Kota	1.844.936.267.453
62	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab/ Kota	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang dikelola	17 Kab/ Kota	16.000.000.000	62	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab/ Kota	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang dikelola	17 Kab/ Kota	16.000.000.000
63	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Kab/ Kota	Jumlah Dana bagi Hasil Provinsi yang dikelola	17 Kab/ Kota	1.943.590.766.667	63	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Kab/ Kota	Jumlah Dana bagi Hasil Provinsi yang dikelola	17 Kab/ Kota	1.943.590.766.667

III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah		9.933.160.832	III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkat nya Pengelolaan Barang Milik Daerah		9.933.160.832
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		9.933.160.832	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		9.933.160.832
64	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun	1 Dokumen	1.159.000.000	64	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun	1 Dokumen	1.159.000.000
65	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan RKBMD yang disusun	41 Laporan	95.000.000	65	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan RKBMD yang disusun	41 Laporan	95.000.000
66	Penatausahaa n Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status	450.200.000	66	Penatausahaa n Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status	450.200.000
67	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan	41 OPD	3.042.000.000	67	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan	41 OPD	3.042.000.000
68	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	20 Laporan Penilaian BMD	360.000.000	68	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	20 Laporan Penilaian BMD	360.000.000
69	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang ter inventarisasi	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	2.558.660.832	69	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang terinventari sasi	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	2.558.660.832
70	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtang aman, Pemusunan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah SK MOU (kerjasama), Perjanjian kerjasama	10SK/ MOU/ PKS (kerjasama)	1.293.500.000	70	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,Pe mindah tangaman, Pemusunan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah SK MOU (kerjasama), Perjanjian kerjasama	10SK/ MOU/ PKS (kerjasama)	1.293.500.000

71	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah laporan BMD tahunan dan semesteran	1 Laporan ,Rekon ,Rekon pertiwiulan & 40 BA Rekon BMD dg OPD	624.800.000		71	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah laporan BMD tahunan dan semesteran	1 Laporan ,Rekon pertiwiulan & 40 BA Rekon BMD dg OPD	624.800.000	
72	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan, 362 BA dan Rekon dg SMA/SMK/SLB	350.000.000		72	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	PLG	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan, 362 BA dan Rekon dg SMA/SMK/SLB	350.000.000	
Jumlah : 72 sub kegiatan					3.967.518.171.652,00		Jumlah : 72 sub kegiatan					3.967.518.171.652,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat, dilakukan penyesuaian dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku. Kemudian dilakukan penelitian kelengkapan informasi dari usulan, terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan, bila perlu dilakukan konfirmasi atau diberi catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan disajikan dalam Tabel T-C.32 berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Sumatera Selatan

No.	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Tercapainya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Dokumen Renja, Revisi Renstra yang disusun	2 Buku	
2	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palembang	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	
3	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palembang	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	
4	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palembang	Jumlah Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	
5	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Palembang	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen Lakip yang disusun	1 buku	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah kinerja perangkat daerah yang dievaluasi	8 laporan	
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	110 ASN	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palembang	Jumlah Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	5 ASN dan 85 Non ASN	
10	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	Jumlah jasa administrasi keuangan	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikator	
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Palembang	Jumlah Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang terkoordinasi	10 Dokumen	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palembang	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terkoordinasi	1 Dokumen	

13	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Palembang dan Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Tanggapan Pemeriksa dan verifikasi hibah	3 Laporan dan 17 Kab/Kota	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Palembang	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Palembang	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Laporan	
17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Palembang	Jumlah kendaraan dan deposit box yang dijamin	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	
18	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah laporan dan hasil penerimaan daerah dari TP-TGR	1 Laporan	
19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah Rekonsiliasi dan Laporan BMD pada SKPD yang disusun	1 Laporan	
20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	21 Unit Kendaraan Dinas	

iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
21	Pengadaan Pakaiannya Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palembang	Jumlah Pakaiannya Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	600 orang/stel
22	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palembang	Jumlah laporan analisa jabatan, evaluasi jabatan dan analisis beban kerja	3 Laporan
23	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Palembang	Laporan Kinerja Pegawai	12 Laporan
24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Palembang dan Luar Provinsi	Jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat	15 orang
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	
25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palembang	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41 jenis
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas

27	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Palembang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	14 jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	
28	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Palembang	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan Penyediaan Makan Minum	10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih	
29	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palembang	Jumlah Kebutuhan Barang cetakan dan Penggandaan	40 jenis yang dicetak, 45.000 counter	
30	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palembang	Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	7 surat kabar	
31	Penyediaan Bahan/Material	Palembang	Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor	50 jenis ATK	
32	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Tamu di ruang konsultasi	10.000 tamu	
33	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palembang	Jumlah Kebutuhan Laporan Koordinasi dan Konsultasi	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	
34	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Palembang	Jumlah Keterbukaan Informasi Publik	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumasel	
35	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palembang	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpelihara	7 Aplikasi	

	vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	36	Pengadaan Mebel	Palembang	Jumlah Meubelair yang tersedia	3 jenis meubelair	
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	37	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Jumlah surat menyurat yang dikirim	6000 surat	
	38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palembang	Jumlah tagihan komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	6 rekening listrik, 6 rekening telepon, 6 rekening air, 9 rekening internet	
	viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		
	39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palembang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi	17 R4, 16 R2	

40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palembang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	4 R4, 4R2	
41	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palembang	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	4 jenis peralatan dan mesin lainnya	
42	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Palembang	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin, venue, dan lahan/area di JSC yang terpelihara	Venue, lahan/area JSC	
43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palembang	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	2 unit gedung kantor, 1 gudang arsip	
II PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN					
DAERAH					
i Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					
44	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Palembang	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS Daerah	2 dokumen	
45	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Palembang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	

46	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Palembang	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran APBD	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	
47	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Palembang	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran Perubahan APBD	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	
48	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Palembang	Jumlah Perda yang dihasilkan	1 Dokumen	
ii	Permbinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pembinaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota		
49	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang terlaksana	17 SK	

50	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang terlaksana	17 SK	
51	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban APBD	17 SK	
iii	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
52	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Palembang	Jumlah laporan rekonsiliasi pengelolaan kas daerah	12 Laporan	
53	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Palembang	Jumlah kewajiban biaya pengelolaan dan biaya provisi	SMI	
54	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Palembang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi DAK Fisik dan Non Fisik	3 Laporan/Jenis Dana Transfer	

55	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Palembang	Jumlah laporan pelaksanaan transaksi non tunai	1 Laporan	
56	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Palembang	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D	41 OPD	
iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
57	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Palembang	Jumlah Laporan rekonsiliasi	12 Bulku, 5 SK kab/kota	
58	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Palembang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	
59	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Palembang	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban	

v	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
60	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Palembang	Jumlah Kewajiban cicilan bunga pinjaman	SMI
61	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab/Kota	Jumlah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 Kab/Kota
62	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab/Kota	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang dikelola	17 Kab/Kota
63	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dana bagi Hasil Provinsi yang dikelola	17 Kab/Kota
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	
i	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	
64	Penyusunan Standar Harga	Palembang	Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun	1 Dokumen
65	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah laporan RKBMD yang disusun	41 Laporan

66	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset
67	Pengamanan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah BMD yang diamankan	41 OPD
68	Penilaian Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	20 Laporan Penilaian BMD
69	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Palembang	Persentase aset yang terinventarisasi	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD
70	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah SK MOU (kerjasama), Perjanjian kerjasama	10 SK/MOU/PKS (kerjasama)
71	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah laporan BMD tahunan dan semesteran	1 Laporan Rekon pertiwalan dan 40 Berita Acara Rekon BMD dengan OPD
72	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	362 Berita Acara dengan Rekon SMA/SMK/SLB
Jumlah : 72 sub kegiatan				

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- 2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Terdiri dari kegiatan:

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Daerah

- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terdiri dari kegiatan:

PROVINSI

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Usulan program tersebut yaitu:

Usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan pada tabel diatas penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan pada tabel diatas mencakup 3 (tiga) program. Program dan kegiatan memiliki indikator kinerja, yaitu tiap program memiliki *outcome* dan kegiatan memiliki *output* yang dapat dilihat dari tabel diatas. Terlihat dengan adanya *output* yang dicapai maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan terwujud sehingga nantinya akan mendukung Visi Kepala Daerah lima tahun ke depan yaitu: **“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”**.

- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 5) Penujang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**
- Terdiri dari kegiatan:
- 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk mencapai visi yang telah digambarkan di atas, maka Misi Kepala Daerah yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparat pemerintah yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif".

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka tujuan dan sasaran pembangunan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah diraihkan pada tabel 3.1 dibawah ini:

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja (Rencana Kerja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan visi Kepala Daerah lima tahun ke depan yaitu:

"Sumatera Selatan Maju Untuk Semua".

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
			2023	2024	2025	2026	
1.1 Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	(1) 1.1.1 Penganggaran yang Baik	(2) a Penetapan Perda dan Pergub APBD yang tepat waktu	(3) Tepat Waktu	(5)	(6)	(7)	(8)
			b Budget Execution: Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	-5% s.d 0 %	-5 % s.d 0 %	-5 % s.d 0 %	-5 % s.d 0 %
	1.1.2 Penatausahaan Keuangan yang Baik	a Persentase dokumen pencairan yang baik sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	
	1.1.3 Pelaporan Keuangan yang Baik	a Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen	WTP	WTP	WTP	WTP	
	1.1.4 Pengelolaan Aset Yang Baik	a Asset Management	100%	100%	100%	100%	
		b Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	

1.2	Kabupaten/Kota yang berkualitas dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.2.1	APBD Kabupaten/Kota yang Baik	a	Persentase APBD Kab/Kota yang tepat waktu dan benar	100%	100%	100%	100%
		1.2.2	Persentase Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota yang Baik	a	Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dalam rangka terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan menciptakan kehandalan laporan keuangan dan pengamanan aset daerah dan menciptakan pelayanan prima bidang keuangan daerah dan aset daerah melalui peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka telah disusun rencana program kerja tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penjabaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan:

- 9) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
- 10) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
- 11) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
- 12) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- 13) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kegiatan:

- 14) Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

KODE	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)	SUMBER DANA		TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
5.02.01	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tercapainya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		128.085.234.957			124.865.589.000	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Pengarangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Pengarangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.364.400.000			1.198.000.000	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja)	Jumlah Dokumen Renja, Revisi Renstra yang disusun	Palembang	135.000.000	PAD	2 Buku	115.500.000	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palembang	167.500.000	PAD	1 dokumen	122.550.000	
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palembang	142.500.000	PAD	1 dokumen	112.500.000	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Penyusunan DPA- SKPD	Palembang	139.000.000	PAD	1 dokumen	109.900.000	
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Palembang	128.000.000	PAD	1 dokumen	98.000.000	

5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lajip yang disusun	Palembang	116.000.000	PAD	1 buku	136.000.000
5.02.01.1.01.07	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kinerja perangkat daerah yang dievaluasi	Palembang	536.400.000	PAD	8 laporan	505.000.000
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		107.477.295.575			106.043.539.000
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	103.491.055.575	PAD	110 ASN	101.562.669.000
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	Palembang	2.570.680.000	PAD	5 ASN dan 85 Non ASN	2.885.110.000
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan	Palembang	792.160.000	PAD	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikasi	787.360.000
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang terkoordinasi	Palembang	65.000.000	PAD	10 Dokumen	65.000.000
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terkoordinasi	Palembang	150.000.000	PAD	1 Dokumen	150.000.000
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemertiksaan	Jumlah Laporan Hasil Tanggapan Pemertiksa dan verifikasi hibah	Palembang dan Kab/Kota	203.400.000	PAD	3 Laporan dan 17 Kab/Kota	403.400.000
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Palembang	155.000.000	PAD	3 Laporan	140.000.000

5.02.01.1.02.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Palembang	50.000.000	PAD	1 Laporan	50.000.000
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		805.200.000			645.000.000
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	Palembang	55.000.000	PAD	1 Laporan	55.000.000
5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan dan deposit box yang dijamin	Palembang	215.000.000	PAD	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	215.000.000
5.02.01.1.03.04	Pembinaan, pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan dan hasil penerimaan daerah dari TP-TGR	Palembang	410.200.000	PAD	1 Laporan	250.000.000
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Laporan BMD pada SKPD yang disusun	Palembang	55.000.000	PAD	1 Laporan	55.000.000
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	Palembang	70.000.000	PAD	21 Unit Kendaraan Dinas	70.000.000
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.120.250.000			693.250.000
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Palembang	450.000.000	PAD	600 orang/stel	0,00
5.02.01.1.05.03	Pengadaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang dihimpun analisa jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan	Palembang	415.250.000	PAD	1 Laporan	413.250.000

5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (PK)	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (PK)	Palembang	55.000.000	PAD	110 ASN	80.000.000
5.02.01.1.05.09	Pen didikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat	Palembang dan Luar Provinsi	200.000.000	PAD	15 orang	200.000.000
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		10.989.382.068			9.244.988.500
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palembang	620.000.000	PAD	41 jenis	420.000.000
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Palembang	3.609.890.418	PAD	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	2.551.600.000
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Palembang	251.450.000	PAD	14 jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	0,00
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan Penyediaan Makan Minum	Palembang	1.191.099.400	PAD	10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih	1.800.000.000
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang cetakan dan Penggandaan	Palembang	994.391.950	PAD	40 jenis yang dicetak, 45.000 counter	943.000.000
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Palembang	52.500.000	PAD	7 surat kabar	52.500.000
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor	Palembang	1.013.142.250	PAD	50 jenis ATK	0,00

5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu di ruang konsultasi	Palembang	210.000.000	PAD	10.000 tamu	200.000.000
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan Laporan Koordinasi dan Konsultasi	Palembang	1.280.508.050	PAD	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	1.000.000.000
5.02.01.1.06.10	Penetausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Keterbukaan Informasi Publik	Palembang	917.400.000	PAD	Sosialisasi PPIID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	466.400.000
5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpelihara	Palembang	849.000.000	PAD	7 Aplikasi	248.000.000
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		385.103.280			440.000.000
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah Meubel yang tersedia	Palembang	385.103.280	PAD	3 jenis meubelair	0,00
5.02.01.1.08	Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.370.250.000			1.370.000.000
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim	Palembang	40.250.000	PAD	1000 surat	40.000.000
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	Palembang	1.330.000.000	PAD	6 rekening listrik, 6 rekening telepon, 6 rekening air, 9 rekening internet	1.330.000.000

5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pemungut Urusan yang terpelihara		4.573.354.034			7.234.570.000
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi	Palembang	1.005.000.000	PAD	17 R4, 16 R2	990.000.000
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	Palembang	334.250.000	PAD	4 R4, 4 R2	349.250.000
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Palembang	1.145.000.000	PAD	4 jenis peralatan dan mesin lainnya	955.000.000
5.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin, venue, dan lahan/area di JSC yang terpelihara	Palembang	480.000.000	PAD	Venue, lahan/area JSC	0,00
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	Palembang	1.609.104.034	PAD	2 unit gedung kantor, 1 gudang arsip	4.940.320.000
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	APBD yang Tepat Waktu		3.906.155.125.599			3.832.719.151.820

5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		4.251.820.000			3.795.500.000
5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS	Palembang	310.000.000	PAD	2 dokumen	360.000.000
5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Palembang	310.000.000	PAD	2 dokumen	360.000.000
5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran APBD	Palembang	1.280.000.000	PAD	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	1.200.000.000
5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran APBD	Palembang	1.280.000.000	PAD	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	1.150.000.000
5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Perda yang dihasilkan	Palembang	1.071.000.000	PAD	1 Dokumen	725.500.000
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota		1.415.000.000			1.340.000.000

5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang terlaksana	Kab/Kota	545.000.000	PAD	17 SK	520.000.000
5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang terlaksana	Kab/Kota	545.000.000	PAD	17 SK	520.000.000
5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban APBD	Kab/Kota	325.000.000	PAD	17 SK	300.000.000
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		5.660.187.700			5.762.937.700

5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi pengelolaan kas daerah	Palembang	581.000.000	PAD	12 Laporan	564.250.000
5.02.02.1.03.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah kewajiban biaya pengelolaan dan biaya provisi	Palembang	4.046.187.700	PAD	SMI	4.326.187.700
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Rekonsiliasi DAK Fisik dan Non Fisik	Palembang	242.000.000	PAD	3 Laporan / Jenis Dana Transfer	155.000.000
5.02.02.1.03.06	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah laporan pelaksanaan transaksi non tunai	Palembang	150.000.000	PAD	1 Laporan	205.500.000
5.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D	Palembang	641.000.000	PAD	41 OPD	512.000.000
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1.711.230.000			1.293.680.000

5.02.02.1.04.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Penbiayaan, Pendapatan - LO, dan Beban	Jumlah Laporan rekonsiliasi	Palembang	543.100.000	PAD	12 Buku, 5 SK kab/kota	310.550.000
5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Palembang	638.600.000	PAD	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	503.600.000
5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Palembang	529.530.000	PAD	1 Raperda Pertanggungjawaban	479.530.000
5.02.02.1.05	Peruntung Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kewenangan Daerah		3.893.116.887.889			3.820.527.034.120
5.02.02.1.05.01	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Kewajiban cicilan bunga pinjaman	Palembang	15.000.000.000	PAD	SMT	16.000.000.000

RENCANA KERJA BPKAD 2023

5.02.02.1.05.02	Analisis Perencanaan dan Penyuluran Bantuan Keuangan	Jumlah Analisis Perencanaan dan Penyuluran Bantuan Keuangan	Palembang	1.902.338.217.277	PAD	17 Kab/Kota	1.844.936.267.453
5.02.02.1.05.03	Pengetahuan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang dikelola	Palembang	20.023.352.300	PAD	17 Kab/Kota	16.000.000.000
5.02.02.1.05.04	Pengetahuan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Dana bagi Hasil Provinsi yang dikelola	Palembang	1.955.755.318.322	PAD	17 Kab/Kota	1.943.590.766.667
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah		9.618.899.832			9.933.160.832
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		9.618.899.832			9.933.160.832
5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun	Palembang	2.109.250.000	PAD	1 Dokumen	1.159.000.000
5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan RKBMID yang disusun	Palembang	95.000.000	PAD	41 Laporan	95.000.000
5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah	Palembang	510.500.000	PAD	41 SK Gubernur 5 SK Alih Status 10 SK Penghapusan Aset	450.200.000
5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan	Palembang	2.288.000.000	PAD	41 OPD	3.042.000.000
5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	Palembang	360.000.000	PAD	20 Laporan Penilaian BMD	360.000.000
5.02.03.1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang terinventarisasi	Palembang	2.558.660.832	PAD	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	2.558.660.832

5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Peminclah tanganan, Penunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah SK MOU (kerjasama, Perjanjian kerjasama)	Palembang	1.256.640.000	PAD	10 SK/ MOU/ PKS (kerjasama)	1.293.500.000
5.02.03.1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD tahunan dan semesteran	Palembang	240.000.000	PAD	1 Laporan Rekon pertiwalan dan 40 BA Rekon BMD dengan OPD	624.800.000
5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Palembang	200.849.000	PAD	1 Laporan, 362 BA Rekon dg SMA/SMK/ SLB	350.000.000
Jumlah : 72 sub kegiatan				3.723.861.098.576,34			3.967.518.171.652

BAB V

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 yang berisikan rencana program dan kegiatan tahun 2023 serta memuat perumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan upaya untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung “**Sumatera Selatan Maju Untuk Semua**”.

Untuk dapat merealisasikan maksud tersebut, diperlukan adanya dukungan sumber daya aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya khususnya di Sumatera Selatan, disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung program dan kegiatan tersebut.

Dengan mensinergikan berbagai aspek yang ada, maka diharapkan dapat menunjang dan memperkuat kemampuan badan dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar bisa terwujud secara maksimal selaku instansi yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mampu menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel sehingga opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat terwujud.